



Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Adat di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Keerom

Semuel Siriwa *, Akbar Silo, Vince Tebay, Renida J Torobi

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: s.siriwa007@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Indigenous peoples, oil palm plantations, socio-cultural transformation, economy, Keerom, Papua

How to Cite:

Siriwa S., Silo A., Tebay V., Torobi J. R. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Adat di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Keerom. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(2): 139-148.

DOI:

10.31957/jeb.v12i2.4141

ABSTRACT

This article analyzes the impact of the development and expansion of oil palm plantation companies on the socio-cultural and economic transformation of indigenous peoples in Keerom District, Papua Province. The study aims to analyze the changes that have occurred in the social structure, cultural practices, and economic systems of indigenous peoples, as well as identify factors that affect their economic conditions after the entry of oil palm plantations. This article uses qualitative research with a descriptive approach. The study was conducted in villages scattered by oil palm plantations in Keerom District. The research instruments used were recording devices and notebooks. Data collection techniques included in-depth interviews and observation. Data analysis includes the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results show that the presence of oil palm plantations has resulted in significant erosion of traditional practices and customary land tenure systems. The transformation of the ecological landscape has resulted in the loss of access to natural resources that have been the economic and spiritual basis of the community. The shift from a subsistence economy to a wage-based economy has changed social dynamics and family structures.

Hak Cipta © 2024 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Masyarakat adat, perkebunan kelapa sawit, transformasi sosial-budaya, ekonomi, Keerom, Papua

Cara Mengutip:

Siriwa S., Silo A., Tebay V., Torobi J. R. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Adat di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Keerom. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(2): 139-148.

DOI:

10.31957/jeb.v12i2.4141

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji dampak dari adanya pengembangan dan ekspansi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap transformasi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat adat di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. studi ini bertujuan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam struktur sosial, praktik budaya, dan sistem ekonomi masyarakat adat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi mereka pasca masuknya perkebunan kelapa sawit. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi kajian dilakukan di kampung-kampung yang tersebar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Keerom. Instrument penelitian yang digunakan adalah alat perekam, dan buku catatan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan erosi signifikan terhadap praktik-praktik tradisional dan sistem kepemilikan tanah adat. Transformasi lanskap ekologis berdampak pada hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi basis ekonomi dan spiritual masyarakat. Pergeseran dari ekonomi subsisten ke ekonomi berbasis upah telah mengubah dinamika sosial dan struktur keluarga..

Hak Cipta© 2024 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Perubahan sosial merupakan fenomena kompleks yang mencakup transformasi dalam pola interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas, yang berkaitan erat dengan struktur sosial serta sistem nilai dan norma. Wilbert Moore (dalam Goa, 2017) menawarkan definisi yang luas, mengkonseptualisasikan perubahan sosial sebagai transformasi signifikan dalam keseluruhan struktur sosial, pola perilaku, dan sistem interaksi sosial, termasuk perubahan dalam norma, nilai, dan fenomena kultural.

Suyanto (2004:362) mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam perubahan sosial, yakni dimensi struktural yang mencakup perubahan dalam status dan peran sosial, termasuk transformasi dalam distribusi kekuasaan, otoritas, fungsi, dan pola komunikasi. Dimensi kultural yang melibatkan perubahan dalam aspek budaya material (seperti teknologi) dan non-material (seperti ide, nilai, dan norma). Dan dimensi interaksional yang merupakan konsekuensi logis dari perubahan dalam dimensi struktural dan kultural, yang tercermin dalam transformasi pola interaksi sosial.

Narwoko (2004:365) mengidentifikasi beberapa perspektif teoretis yang digunakan untuk menganalisis perubahan sosial, termasuk teori sosiohistoris, struktural fungsional, struktural konflik, dan psikologi sosial. Teori sosiohistoris, sebagaimana dijelaskan oleh Polii et al. (2018), menempatkan penekanan pada latar

belakang historis dan proses evolusi sebagai faktor kunci dalam dinamika perubahan sosial. Perspektif ini mengkonseptualisasikan perubahan sosial dalam dua dimensi yang berbeda, yakni Perubahan sebagai siklus: Melihat perubahan sosial sebagai proses siklis yang sulit diidentifikasi titik awal dan akhirnya. Dan perubahan sebagai perkembangan yang memandang perubahan sosial sebagai proses gradual namun pasti, di mana masyarakat berevolusi dari struktur sosial sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks dan modern.

Seringkali dengan proses modernisasi membawa sejumlah perubahan-perubahan terhadap kehidupan masyarakat adat. Keraf (2014:112), menyajikan definisi komprehensif yang mencakup dua kategori utama yakni Suku-suku asli dengan karakteristik sosial-budaya dan ekonomi yang distinktif, yang statusnya diatur oleh sistem adat atau tradisi yang unik. Komunitas yang mengidentifikasi diri atau diidentifikasi oleh pihak lain sebagai keturunan dari penduduk asli yang telah mendiami wilayah tersebut sejak era pra-kolonial atau sebelum penetapan batas-batas administratif modern. Kartika & Gautama (1999), sebagaimana dikutip oleh Kadir et al. (2020), menawarkan definisi yang lebih spesifik, menggambarkan masyarakat adat sebagai entitas komunal yang memiliki akar genealogis yang kuat, mendiami wilayah geografis tertentu, dan memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang unik. Namun keunikan dan ciri khas yang merupakan karakteristik dari identitas masyarakat adat mulai terdistrupsi akibat adanya proses modernisasi dengan mengatasmakan pembangunan.

Salah satunya adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat adat. Penetrasi produk-produk perkotaan seperti makanan instan dan minuman kemasan telah menggantikan konsumsi minuman tradisional seperti tuak. Selain itu, persepsi terhadap fungsi pakaian juga mengalami pergeseran dari sekadar penutup tubuh menjadi elemen estetika (Anindita et al., 2019).

Fenomena transformasi serupa juga teramati di kawasan Keerom, Papua. Sanggenafa (2020) mengkritisi perubahan ekonomi dan alih fungsi lahan pangan menjadi perkebunan kelapa sawit. Potensi ekonomi dari industri sawit telah mendorong sebagian masyarakat adat Keerom untuk mengalihkan kepemilikan tanah mereka. Namun, petani lokal yang merupakan masyarakat adat seringkali kalah bersaing dengan petani pendatang yang memiliki kapabilitas lebih mumpuni. Sanggenafa (2020) menguraikan secara komprehensif dampak ekspansi kelapa sawit di wilayah tersebut. Pada tahun 1983, program transmigrasi diinisiasi di Distrik Arso dan Skanto, Kabupaten Keerom. Program ini kemudian diikuti oleh pembukaan lahan kelapa sawit melalui Program Inti Rakyat (PIR) yang mencakup area seluas 10.545 hektar di Distrik Arso dan 5.951 hektar di Distrik Skanto.

Masyarakat Keerom kontemporer telah mengalami transformasi signifikan dalam aspek kehidupan mereka. Meskipun pembangunan infrastruktur telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, sebagian besar masyarakat masih mempraktikkan sistem subsisten tradisional seperti meramu, menokok sagu, dan berburu (Kotib et al., 2022). Sejak masuknya industri kelapa sawit ke Distrik Arso dan

Skanto, mayoritas masyarakat telah beralih ke pertanian sawit, bahkan banyak yang menjadi tenaga kerja di perusahaan kelapa sawit. Namun, keterbatasan kompetensi dan keahlian membuat mereka hanya ditempatkan pada posisi-posisi teknis di lapangan (Turua et al., 2014). Sanggenafa (2020) mencatat bahwa penduduk asli umumnya tidak dibekali dengan keterampilan pertanian yang memadai.

Untuk tetap mengedepankan keberpihakan terhadap proses pembangunan yang lebih manusiawi, harus ada komitmen bagi para pemangku kebijakan untuk menjalankan pembangunan yang berbasis pada peningkatan taraf kehidupan masyarakat tempatan. Kebijakan publik telah mengalami perkembangan dan interpretasi yang beragam dalam diskursus akademik. Charles O. Jones (dalam Winarno, 2002:14) mengemukakan bahwa terminologi kebijakan (policy) seringkali digunakan secara fleksibel dalam konteks praktis, namun cenderung dipertukarkan dengan berbagai konsep seperti tujuan, program, keputusan, standar, proposal, dan grand design. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan multidimensionalitas dari konsep kebijakan dalam ranah publik.

Carl J. Friedrich (dalam Winarno, 2002:16) menawarkan definisi yang lebih komprehensif, menyatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh entitas tertentu - baik individu, kelompok, maupun pemerintah - dalam konteks spesifik. Definisi ini menekankan aspek kontekstual dan strategis dari kebijakan, dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang dalam implementasinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, Lester dan Stewart (Winarno, 2002:166) mengidentifikasi dua fungsi utama: Analisis konsekuensi: Melibatkan identifikasi dan deskripsi dampak yang ditimbulkan oleh implementasi kebijakan. Serta, penilaian efektivitas: Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan merupakan proses yang bersifat empiris, melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap berbagai aspek kebijakan, termasuk tahap implementasi, hasil (outcome), dan dampak (impact). Proses ini bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai dampak perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi sosial budaya di Kabupaten Keerom menjadi urgen untuk dilakukan. Studi-studi terdahulu cenderung berfokus pada aspek sosio-ekonomi, sehingga terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai perspektif masyarakat adat dan dimensi sosial-budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai efek perkebunan kelapa sawit terhadap transformasi sosial budaya dari sudut pandang masyarakat adat Kabupaten Keerom. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak ekonomi masyarakat adat setelah masuknya perkebunan Sawit di Kabupaten Keerom dan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat adat Kabupaten Keerom setelah masuknya perkebunan kelapa sawit.

2. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian merupakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang transformasi sosial-budaya masyarakat adat Keerom sebagai konsekuensi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Fokus utama penelitian adalah pada interaksi antara perkebunan kelapa sawit, transformasi sosial-budaya, dan perspektif masyarakat adat Kabupaten Keerom. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Keerom merupakan salah satu daerah di Papua yang mengalami ekspansi perkebunan kelapa sawit secara masif. Lokasi ini juga dipilih berdasarkan aksesibilitas peneliti dalam melakukan pengumpulan data dan observasi awal untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika yang terjadi, mulai dari proses negosiasi hingga masuknya perkebunan kelapa sawit dan terjadinya transformasi budaya pada masyarakat setempat.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan analisis dokumen. Wawancara mendalam akan fokus pada narasi dan penggambaran pengalaman informan terkait perubahan kehidupan dan penghidupan akibat masuknya perkebunan kelapa sawit di wilayah adat mereka. Observasi aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat adat Keerom untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas sosial-budaya mereka. Sedangkan analisis dokumen, menelaah terhadap naskah-naskah atau arsip dokumen yang relevan dengan topik kajian akan dilakukan untuk memberikan konteks historis dan budaya masyarakat Keerom. Kombinasi antara penelitian arsip dan penelitian lapangan diharapkan dapat menghasilkan penjabaran yang komprehensif mengenai transformasi sosial-budaya di Kabupaten Keerom. Analisis data dimulai dengan data dikategorisasi dan diinterpretasi untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dampak Kehadiran Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Adat

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Keerom, Papua, telah menghasilkan transformasi signifikan dalam struktur sosial-budaya dan ekonomi masyarakat adat. Analisis menunjukkan bahwa dampak ini bersifat multidimensional, mencakup aspek-aspek berikut:

Pertama, erosi budaya dan praktik tradisional. Sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit, masyarakat adat Keerom memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alamnya. Praktik-praktik seperti berburu, meramu, dan ritual yang berkaitan dengan alam merupakan komponen integral dari identitas kultural mereka. Namun, penelitian mengindikasikan bahwa ekspansi perkebunan sawit telah mengakibatkan erosi signifikan terhadap praktik-praktik ini. Muttaqin (2021) mencatat bahwa hilangnya akses ke tanah dan hutan telah menyebabkan banyak praktik tradisional mulai terlupakan, dengan generasi muda semakin terputus dari warisan budaya mereka.

Kedua, perubahan struktur kepemilikan tanah. Berdasarkan dokumen historis yang diteliti, penetapan areal perkebunan sawit di Keerom dimulai dengan Surat Gubernur Propinsi Irian Jaya No. 143/GIJ/1983 tertanggal 26 Mei 1983, yang mengalokasikan area seluas 50.000 hektare untuk tujuan ini. Proses ini menandai titik balik dalam sistem kepemilikan tanah tradisional, mengakibatkan pergeseran dari pengelolaan komunal ke model kepemilikan yang lebih individualistis atau korporat.

Ketiga, Transformasi sosio-ekonomi. Kehilangan tanah adat telah mengakibatkan pergeseran signifikan dalam struktur ekonomi masyarakat. Banyak keluarga yang sebelumnya mengandalkan pertanian subsisten, perburuan, dan pengumpulan hasil hutan terpaksa beralih ke ekonomi berbasis upah. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada pendapatan, tetapi juga pada dinamika keluarga dan kohesi sosial komunitas.

Keempat, gangguan terhadap praktik spiritual dan budaya. Penelitian menunjukkan bahwa kehilangan akses ke situs-situs yang dianggap suci telah mengganggu pelaksanaan ritual dan upacara adat. Hal ini berimplikasi pada transmisi pengetahuan tradisional dan nilai-nilai budaya antar generasi, mengancam kelangsungan identitas kultural masyarakat adat Keerom.

3.2. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ekonomi Masyarakat Adat

Analisis mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat adat dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit; *Pertama*, kebijakan pemerintah. Kebijakan di tingkat pusat dan daerah memainkan peran instrumental dalam membentuk lanskap ekonomi. Regulasi terkait penggunaan lahan, program pemberdayaan masyarakat, dan insentif ekonomi secara langsung mempengaruhi partisipasi dan manfaat yang diperoleh masyarakat adat dari sektor kelapa sawit.

Kedua, dinamika pasar global. Fluktuasi harga kelapa sawit di pasar internasional memiliki dampak langsung pada pendapatan petani lokal. Volatilitas ini menciptakan ketidakpastian ekonomi dan mempengaruhi keputusan investasi masyarakat adat dalam sektor ini.

Ketiga, akses terhadap modal dan teknologi. Kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya finansial dan teknologi modern menjadi faktor pembeda yang signifikan dalam kemampuan masyarakat adat untuk berpartisipasi secara efektif dan mengambil manfaat dari ekonomi berbasis kelapa sawit.

Keempat, kapasitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan keterampilan teknis masyarakat adat berkorelasi langsung dengan kemampuan mereka untuk mengelola perkebunan secara efisien dan memaksimalkan nilai tambah dari produksi kelapa sawit.

Kelima, peran lembaga adat. Kekuatan dan efektivitas lembaga adat dalam proses negosiasi dan pengambilan keputusan terkait alokasi lahan dan pembagian manfaat ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap posisi tawar masyarakat adat dalam ekonomi kelapa sawit.

Keenam, perubahan ekologis. Transformasi lanskap ekologis akibat ekspansi perkebunan sawit berdampak pada ketersediaan sumber daya alam yang selama ini menjadi basis ekonomi tradisional. Hal ini memaksa adaptasi ekonomi yang seringkali menantang bagi masyarakat adat.

Ketujuh, Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Keerom telah menghasilkan transformasi mendasar dalam struktur sosial-budaya dan ekonomi masyarakat adat. Sementara sektor ini membuka peluang ekonomi baru, dampaknya terhadap praktik tradisional, kepemilikan tanah, dan kohesi sosial menimbulkan tantangan signifikan. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, dinamika pasar global, dan kapasitas adaptif masyarakat adat akan menentukan trajektori perkembangan ekonomi di masa depan. Diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek kultural, ekologis, dan ekonomi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat adat Keerom.

3.3. Agenda Masa Depan

Perkebunan kelapa sawit yang ekstensif di Kabupaten Keerom menunjukkan terdapat narasi kompleks mengenai perjuangan hak-hak tanah adat yang tidak mudah terlihat. Komunitas adat yang telah bermukim di wilayah tersebut selama beberapa generasi kini menghadapi dilema signifikan dalam upaya mempertahankan hak-hak teritorial mereka.

Masyarakat adat yang sebelumnya mengandalkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam kini dihadapkan pada transformasi lanskap hutan menjadi area monokultur kelapa sawit. Fenomena ini memunculkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernisasi. Sebagai contoh, sistem demarkasi tanah tradisional yang menggunakan penanda alami seperti pohon, sungai, dan bukit telah digantikan oleh sistem sertifikasi formal. Salah satu isu krusial yang muncul adalah ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum positif. Konsep kepemilikan tanah komunal yang dianut masyarakat adat seringkali bertentangan dengan sistem hukum nasional yang lebih mengedepankan kepemilikan individual atau negara. Proses translasi hak adat ke dalam kerangka hukum formal terbukti kompleks dan memerlukan waktu yang signifikan, sehingga meningkatkan kerentanan masyarakat adat terhadap pengambilalihan lahan.

Meskipun undang-undang otonomi khusus dimaksudkan untuk melindungi hak-hak adat, implementasinya di lapangan sering kali tidak optimal. Kurangnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak berkepentingan. Disparitas posisi tawar antara korporasi besar dan komunitas adat mengakibatkan proses negosiasi yang tidak setara. Dalam konteks internal komunitas, terjadi polarisasi pandangan mengenai kehadiran perkebunan sawit. Sebagian anggota masyarakat melihatnya sebagai peluang ekonomi, sementara yang lain berupaya mempertahankan moda hidup tradisional. Fragmentasi internal ini berdampak pada melemahnya posisi kolektif masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Ketika terjadi sengketa lahan, masyarakat adat seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan.

Selain itu, terdapat risiko hilangnya kearifan lokal dan pengetahuan tradisional tentang pengelolaan hutan di tengah arus perubahan. Sistem hukum formal mengalami kesulitan dalam mengakomodasi dan melindungi pengetahuan ini, yang sesungguhnya vital bagi kelestarian lingkungan dan identitas budaya masyarakat adat.

Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik dan sensitif. Beberapa langkah krusial yang perlu dipertimbangkan meliputi reformasi hukum yang mengakui pluralisme hukum, penguatan kapasitas masyarakat adat, peningkatan dialog multi-pihak, serta komitmen politik yang kuat untuk melindungi hak-hak adat.

Kasus masyarakat adat Keerom merepresentasikan perjuangan yang lebih luas di Indonesia, bahkan dalam konteks global. Ini mencerminkan dikotomi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, serta antara modernisasi dan kearifan tradisional. Dalam upaya mencapai keseimbangan, aspirasi masyarakat adat perlu diakomodasi dan dihargai. Hanya melalui pendekatan inklusif semacam ini, masa depan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dapat direalisasikan.

4. Kesimpulan

Masuknya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Keerom telah menghadirkan perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi masyarakat adat. Terjadi transformasi dari ekonomi subsisten tradisional menuju ekonomi pasar yang lebih modern. Pada awalnya, banyak anggota masyarakat adat mengalami peningkatan pendapatan yang cukup berarti, terutama mereka yang memiliki akses langsung ke lahan perkebunan atau yang bekerja di sektor ini.

Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru. Ketimpangan ekonomi mulai terlihat antara mereka yang memiliki lahan dan yang tidak, serta antara penduduk lokal dan pendatang yang bekerja di perkebunan. Banyak lahan adat yang dikonversi menjadi perkebunan sawit, mengakibatkan sebagian masyarakat kehilangan akses ke tanah leluhur mereka. Meskipun muncul peluang ekonomi baru seperti usaha pendukung perkebunan, ada risiko ketergantungan berlebihan pada sektor sawit yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi ekonomi masyarakat pasca masuknya perkebunan sawit meliputi urgensi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan. Kemudian akses terhadap modal dan teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan masyarakat adat dalam memanfaatkan peluang ekonomi dari sektor sawit. Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat dan peran lembaga adat dalam negosiasi dan pengambilan keputusan terkait lahan sangat krusial.

Perjuangan kompleks masyarakat adat dalam mempertahankan hak tanah mereka di tengah transformasi dari hutan menjadi area monokultur. Konflik antara nilai tradisional dan modernisasi, serta ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum positif, memperburuk situasi. Meski undang-undang otonomi khusus dirancang untuk melindungi hak-hak adat, implementasinya sering tidak optimal, dengan disparitas posisi tawar dan polarisasi internal yang melemahkan perjuangan masyarakat. Untuk

menghadapi tantangan ini, pada agenda di masa yang akan datang diperlukan reformasi hukum yang mengakui pluralisme hukum, penguatan kapasitas masyarakat adat, dialog multi-pihak, dan komitmen politik yang kuat. Kasus Keerom mencerminkan konflik global antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, dan menegaskan pentingnya pendekatan inklusif untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Goa, L. (2017). Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 2(2), 53-67.
- Goodin, R. E. (2018). *Handbook Ekonomi Politik*. Nusamedia.
- Kadir, A., Rahmanto, M. I., Idris, U., & Ali, A. (2020, October). The process of economic change of the Papuans in Jayapura. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 575, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
- Kartika, S., & Gautama, C. (1999). *Menggugat posisi masyarakat adat terhadap negara: prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara*. Diterbitkan Atas Kerja Sama Panitia Bersama S Ngres Masyarakat.
- Keraf. (2014). *Filsafat lingkungan hidup: Alam sebagai sebuah sistem kehidupan bersama Fritjof Capra*. PT Kanisius.
- Kotib, S. A. N., Ds, V. S., & Kumalasari, L. D. Makna Tradisi Bakar Batu Suku Dani (Studi Etnografi Di Kalangan Masyarakat Kampung Alang-Alang V Kabupaten Keerom Papua). *Sosial Budaya*, 19(2), 155-163.
- Muttaqin, M. Z. (2021). Analisis keterlibatan Lembaga swadaya masyarakat dalam program hutan kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(1), 1-13.
- Narwoko, J. D. (2004). Sosiologi teks pengantar dan terapan.
- Polii, A. I., Akhmad, A., & Idris, U. (2018). Penerapan Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Mewujudkan Harmoniasi Sosial-Budaya Di Jayapura, Papua. In *Seminar Nasional dan Pra Lokakarya ADJASI*.
- Sanggenafa, E. L. M. (2020). Sistem Ekonomi Tradisional Orang Keerom di Papua, Indonesia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 5(11), 188-196.
- Suparlan, P. (1972). Beberapa Aspek Kehidupan Orang Arso. *Irian: Bulletin for Irian Jaya Development*, 3, 55-70.
- Suyanto, A. (2004). *Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Keluarga Dan Kondisi Sanitasi Lingkungan Dengan Pertumbuhan Balita di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2002 (Correlation Between Household Socio-Economic Level And Environmental Sanitation Condition With Underfive Years Old Children Growth In Central Java Province In 2001-2002)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Turua, U., Hadi, S., Juanda, B., & Murniningtyas, E. (2014). Ekologi dan Budaya Petani Asli Papua dalam Usaha Tani di Kabupaten Keerom. *Sosiohumaniora*, 16(3), 234-41.

Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.